

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

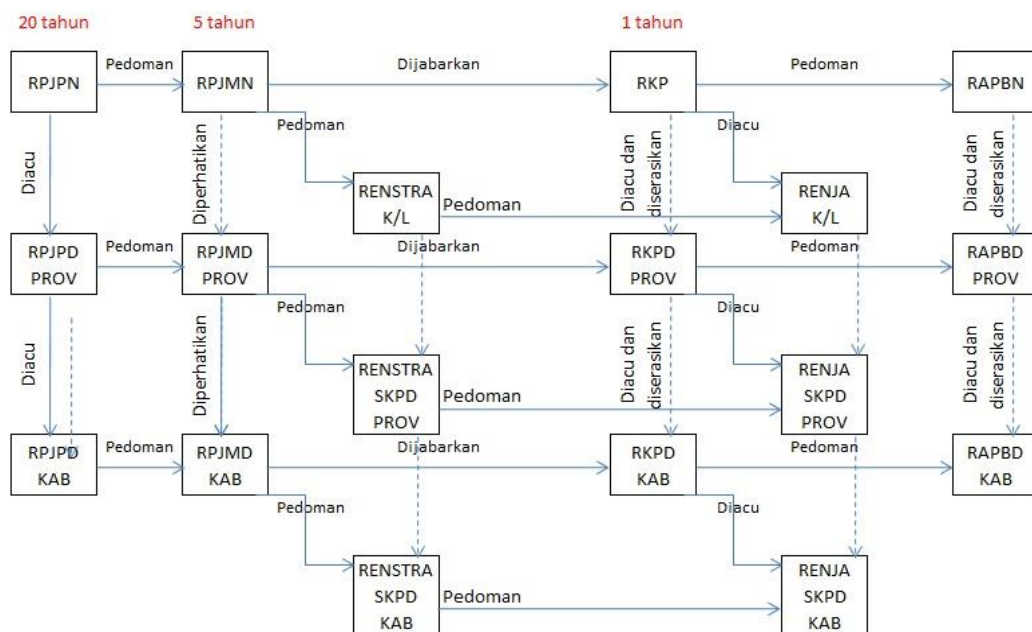
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam

rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2023;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Analisis gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2010, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. *Mereview* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu berdasarkan Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai

dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun dalam proses ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10

- Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2023;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 dan Capaian Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 terhadap capaian Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2023.

Evaluasi terhadap capaian Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		100	109.000.000	1.340.928.550		12.351.250		1.036.411.820		81.982.400		0	1.339.716.100	0	99,91				
		Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	%	87		87,21	87,21		87,21		87,21		87,21		100					
		Presentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	%	30		25,00	25,00		25,00		25,00		25,00		83,33					
		Presentase keterwakilan perempuan di DPRD	%	30		31,82	31,82		31,82		31,82		31,82		100					
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	390	109.000.000	1.340.928.550	0	12.351.250	250	1.036.411.820	40	81.982.400	100	208.970.630	390	1.339.716.100	100	99,91		
																	Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100		
																		Predikat	Sangat Tinggi	

8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				36.600.000	12.653.300		740.500		1.256.250		2.566.300				12.300.937		97,22	
		Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	%	100			0	0		0		0		0			0		
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pemerintahan di bidang seni, budaya, agama, kemasayarakatan dan ekonomi	ormas	140	36.600.000	12.653.300	5	740.500	10	1.256.250	30	2.566.300	95	7.737.887	140	12.300.937	100	97,22	
																		Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100
																		Predikat	Sangat Tinggi
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				120.000.000	484.680.288		6.504.143		2.613.000		145.155.600		330.264.700		484.537.443		99,97	
		Presentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasayarakatan, dan ekonomi	%	100			100	100		100		100		100			100		
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang kondusif	orang	755	120.000.000	484.680.288	50	6.504.143	25	2.613.000	220	145.155.600	460	330.264.700	755	484.537.443	100	99,97	
																		Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100
																		Predikat	Sangat Tinggi

8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				750.000.000	528.483.000		4.781.300		150.698.000		217.692.100		155.281.600		528.453.000		99,99
		Presentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	%	100			100	100		100		100		100		100		
		Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	10			0	0		0		36,68		36,68		100		
		Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	35			0	0		0		0		0		0		
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		orang	160	723.000.000	519.559.200	0	3.480.400	45	148.132.300	60	215.115.900	55	152.802.600	160	519.531.200	100	99,99

8.01.06 .2.01.0 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penganan Konflik di Daerah	orang	30	27.000.000	8.923.800	0	1.300.900	10	2.565.700	10	2.576.200	10	2.479.000	30	8.921.800	100	99,98	
																Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100	
																Predikat	Sangat Tinggi	
8.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)		10 0	301.580.000	210.648.300		42.685.558		51.335.672		40.883.944		61.204.653	0	196.109.827	100	93,10
8.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		bulan	12	1.430.000	2.753.800	3	502.000	3	750.500	3	0	3	1.450.000	12	2.702.500	100	98,14
8.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		bulan	12	7.150.000	4.599.100	3	380.000	3	1.812.500	3	1.280.000	3	1.117.500	12	4.590.000	100	99,80
8.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		bulan	12	4.950.000	3.451.000	3	677.500	3	1.185.800	3	1.087.700	3	495.000	12	3.446.000	100	99,86
8.01.01 .2.06.0 1	Fasilitasi Kunjungan Tamu		bulan	12	7.150.000	6.100.000	3	3.068.000	3	701.500	3	740.000	3	1.575.819	12	6.085.319	100	99,76
8.01.01 .2.06.0 1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		bulan	12	57.150.000	6.675.000	3	2.600.500	3	760.500	3	0	3	3.313.500	12	6.674.500	100	99,99

8.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	1.760.000	2.520.000	3	0	3	800.000	3	600.000	3	1.000.000	12	2.400.000	100	95,24	
8.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	bulan	12	24.750.000	16.200.000	3	2.864.858	3	2.964.095	3	2.792.725	3	2.391.647	12	11.013.325	100	67,98	
8.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	2.750.000	2.475.000	3	2.400.000	3	0	3	0	3	0	12	2.400.000	100	96,97	
8.01.01 .2.06.0 1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	126.000.000	133.636.000	3	28.000.000	3	31.500.000	3	31.500.000	3	34.991.718	12	125.991.718	100	94,28	
8.01.01 .2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	bulan	12	24.970.000	29.344.700	3	1.771.000	3	9.952.777	3	2.391.019	3	13.809.469	12	27.924.265	100	95,16	
8.01.01 .2.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	40.000.000	1.370.700	3	50.000	3	544.000	3	50.000	3	725.000	12	1.369.000	100	99,88	
8.01.01 .2.09.1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	3.520.000	1.523.000	3	371.700	3	364.000	3	442.500	3	335.000	12	1.513.200	100	99,36	
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan		100	
															Predikat		Sangat Tinggi	
Jumlah				1.562.180.000	2.622.860.341		96.059.951		1.242.314.742		488.958.844		2.605.981.607					
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan perangkat daerah		100	99,36
															PREDIKAT		Sangat Tinggi	
															Rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah		63,20	
															PREDIKAT		Upaya Keras	

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - f. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah
 - g. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - h. Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - i. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - j. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.

3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2021 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indek Toleransi	%	3,15	0,64	4,15	4,17	4,19	0,8	4	4,5			100	TT
2	Indeks Gotong Royong	%	3,15	0,64	4,2	4,21	4,22	4,15	0,83	4,33			100	TT
3	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	60	60	62	62	62	0	0	0			0	UK
4	Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	10	10	10	10	10	30,7	0	4,84			48,44	UK
5	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	%	87	87	87	87	87	87,20	87,21	87,21			87,21	TT
6	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	%	30	30	30	30	30	25	25	25			83,33	AT
7	Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	%	30	30	30	30	30	31,11	33,33	33,33			100	TT
8	Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	0	0	0			0	UK
9	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100	TT
10	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100			100	TT
11	Persentase desa/ kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	5	10	10	10	10	0	68,60	36,68			100	TT

12	Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	30,3	35	35	35	35	75	0	0			0	UK
----	---	---	------	----	----	----	----	----	---	---	--	--	---	----

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 6 terdiri dari:
 - a. Indeks Gotong Royong.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya pandemi yang berdampak besar bagi kehidupan masyarakat mampu menumbuhkan sikap gotong royong dan kepedulian antar masyarakat
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masuknya budaya asing yang mempengaruhi mental bangsa.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pelatihan dan peningkatan kualitas aparatur desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
 - 2) Indeks Toleransi
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Budaya masyarakat Temanggung yang masih tinggi rasa tepo seliro mendorong indeks toleransi yang tercipta tinggi
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Adanya gadget dan internet yang sudah menjangkau sampai di pedesaan menumbuhkan sikap tidak peduli pada lingkungan karena sibuk dengan gadget masing2.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah peningkatan kinerja FKUB, peningkatan peran actor local untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan masyarakat.
 - 3) Prosentase keterwakilan perempuan di DPRD
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah masyarakat khususnya perempuan mulai paham dengan politik dan memiliki keinginan untuk menjadi anggota dewan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah sudut pandang pemikiran masyarakat desa bahwa perempuan bukan sebagai pemimpin.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dilakukan sosialisasi pendidikan politik khususnya perempuan.
 - 4) Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya

- monitoring, pengawasan dan koordinasi yang terjalin dengan baik dengan masyarakat dan Instansi terkait.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masyarakat yang kurang terbuka akan informasi.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mempererat kerjasama untuk koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat
- 5) Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya tim khusus untuk pengawasan daerah sehingga sebelum konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masyarakat yang kurang terbuka akan informasi.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mempererat kerjasama untuk koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat
- 6) Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah keinginan dan kesadaran masyarakat untuk menciptakan generasi muda yang bebas dari narkoba.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat saat pandemi Covid 19 yang tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan sosialisasi.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mempererat kerjasama untuk koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat
- 7) Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah keinginan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran demokrasi pada masyarakat Temanggung.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Kegiatan Sosialisasi atau penyebar luasan pelaksanaan pemilu bagi masyarakat.

2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 1 terdiri dari:
 - a. Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya kesetaraan gender, mengangkat kaum perempuan untuk sejajar dengan pria.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah anggapan masyarakat yang menganggap perempuan lemah dan lebih memosisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah diadakan kegiatan sosialisasi atau pendidikan politik bagi kaum perempuan.
3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 4 terdiri dari:
 - a. Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah wujud rasa cinta terhadap tanah air mendorong keinginan untuk memiliki pengetahuan wawasan kebangsaan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya PPKM membuat pelaksanaan sosialisasi dibatalkan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah sosialisasi wawasan kebangsaan di sekolah akan dilaksanakan di triwulan pertama tahun 2022.
 - b. Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman kebangsaan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah wujud rasa cinta terhadap tanah air mendorong keinginan untuk memiliki pengetahuan wawasan kebangsaan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya PPKM membuat pelaksanaan sosialisasi dibatalkan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah sosialisasi wawasan kebangsaan di desa akan dilaksanakan di triwulan pertama dan kedua tahun 2022.
 - c. Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah wujud rasa cinta terhadap tanah air mendorong keinginan untuk memiliki pengetahuan wawasan kebangsaan
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya PPKM membuat pelaksanaan sosialisasi dibatalkan.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pelaksanaan koordinasi dengan FKUB dan akan dibentuk forum komunikasi umat beragama di Kecamatan di tahun 2022.
- d. Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran masyarakat untuk mencegah narkoba.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya PPKM membuat pelaksanaan sosialisasi dibatalkan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pelaksanaan sosialisasi narkoba di triwulan II tahun 2022.

ii. Data Pokok

Data Pokok pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rincian sebagai berikut:

1. INDEKS TOLERANSI

Pendefinisian toleransi berdasarkan Statistik Modal Sosial Indonesia 2014 adalah “salah satu perwujudan moda social kognitif yang dipahami sebagai sikap mau menerima dan menghargai perbedaan diantara anggota masyarakat”. Komponen toleransi yang ada di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari terlihat dari sikap toleran terhadap persahabatan antar suku bangsa lain dan agama lain maupun aktifitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dari agama dan suku lain.

Tabel 2.3

Target dan Realisasi Indeks Toleransi

TARGET KINERJA					REALISASI				
2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
3,15	0,64	4,15	4,17	4,19	0,828	4	4,5		

2. INDEKS GOTONG ROYONG

Bidang kegiatan gotong royong meliputi kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta lingkungan. Pengaplikasian gotong royong dalam penilaian kinerja

diarahkan untuk mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, dan kegiatan bakti sosial, maupun jejaring sosial.

Tabel 2.4
Target dan Realisasi Indeks Gotong Royong

TARGET KINERJA					REALISASI				
2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
3,15	0,64	4,2	4,21	4,22	4,15	0,83	4,33		

3. PERSENTASE SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PEMAHAMAN KEBANGSAAN

Untuk mengetahui berapa sekolah yang telah mendapatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan, maka dapat dihitung dengan rumus berikut: jumlah sekolah yang telah mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan di bagi jumlah sekolah yang ada, dikalikan 100%.

Tabel 2.5 Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan Tahun 2016-Triwulan IV 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sekolah yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	Na	Na	Na	0	0	0
2	Jumlah keseluruhan sekolah yang ada	Na	Na	Na	80	80	80
3	Prosentase sekolah yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	Na	Na	Na	0	0	0

Pada tahun 2019 tidak dilaksanakan sosialisasi pemahaman kebangsaan di tingkat sekolah karena minimnya anggaran dan dialihkan ke sosialisasi pemahaman kebangsaan di desa. Pada tahun 2020 juga tidak dilaksanakan karena anggaran di refocusing. Pada tahun 2021 sosialisasi wawasan kebangsaan pada sekolah di Kabupaten Temanggung belum dilaksanakan, hal ini karena fokus pelaksanaan sosialisasi pada tahun 2019 s.d 2021 adalah di tingkat desa. Sedangkan sosialisasi di sekolah akan

dilaksanakan pada tahun 2022.

4. CAKUPAN DESA/ KELURAHAN YANG MENDAPATKAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN

Untuk mengetahui berapa Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan dapat dihitung dengan rumus berikut: Jumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan di bagi jumlah Desa yang ada dikali 100%.

Persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel 2.6 Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan Tahun 2020 s.d Triwulan IV 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa/Kel yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	18	21	23	3	0	14
2	Jumlah keseluruhan Desa/Kel yang ada	289	289	289	289	289	289
3	Prosentase Desa/Kel yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	6,2	7,2	7,95	1,03	0	4,8

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2021

Pada RPJMD periode 2019 s.d 2023 dengan tahun awal 2019 ada 3 desa yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan, sedangkan jumlah desa sebanyak 25 pada data pokok triwulan IV tahun 2019 adalah jumlah akumulasi desa yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan dari tahun 2014. Di tahun 2020 tidak ada sosialisasi wawasan kebangsaan di desa/kelurahan karena anggaran di refocusing. Di tahun 2021 sampai dengan triwulan IV ada 14 desa yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan.

Sejak tahun awal RPJMD (2019) sampai dengan TW IV 2021 telah ada 17 desa dari total 289 desa/kelurahan yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan.

5. PRESENTASE PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

Yang dimaksud dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah jumlah pemilih keseluruhan yang hadir di

TPS menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu legislatif. (sumber dari Bidang Politik dan Wasbang)

Untuk mengetahui hal tersebut dapat digunakan rumus Jumlah pemilih yang hadir di TPS yang menggunakan hak pilihnya dibagi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara Keseluruhan, dikalikan 100%. Prosentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif sampai Tahun 2021 TW IV dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut;

TABEL 2.7
Presentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam PILEG 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pemilih keseluruhan yang hadir di TPS	485.608	485.608	485.608	529.859	529.859	529.859
2	Jumlah Pemilih tetap secara Keseluruhan	582.486	582.486	582.486	607.598	607.598	607.598
3	Prosentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya	83,36 %	83,36 %	83,36 %	87.20 %	87.20 %	87.20 %

Sumber : Diambil dari Sertifikat hasil perhitungan suara (DB) pada pelaksanaan pemilu ./ KPUD Temanggung dan hasil Monitoring Kesbangpol Temanggung Tahun 2021

6. PROSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA POLITIK

Untuk mengetahui prosentasenya dapat digunakan rumus sebagai berikut Jumlah pengurus partai politik perempuan dibagi jumlah seluruh pengurus partai politik dikali 100, Maka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8 Prosentase perempuan yang menjadi pengurus di partai politik yang memiliki kursi keterwakilan di DPRD Tahun 2016 sd tw IV 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pengurus partai politik perempuan	88	88	88	98	98	98
2	Jumlah seluruh pengurus partai politik	388	388	388	392	392	392
3	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik (%)	22,68	22,68	22,68	25	25,00	25,00

Sumber: Badan Kesbangpol Temanggung 2021

Jumlah Perempuan menjadi Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten yang mempunyai wakil di DPRD Hasil Pemilu 2019, Data ini berdasarkan Surat Keputusan Susunan Pengurus masing masing Partai Politik .

No	Nama Partai	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	Partai Gerindra	14	7	21
2	Partai Golkar	45	16	61
3	PPP	55	10	65
4	PKS	5	3	8
5	PKB	31	18	49
6	Partai Hanura	54	11	65
7	Partai NaSdem	17	5	22
8	PDIP	13	6	19
9	Partai Amanat Nasional	48	16	64
10	Demokrat	12	6	18
	TOTAL	294	98	392

7. PROSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KAB. TEMANGGUNG

Untuk memperoleh angka prosentase keterwakilan perempuan di DPRD digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah perempuan yang menduduki kursi anggota DPRD dibagi jumlah total kursi anggota DPRD dikalikan 100% . Diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2.9
Prosentase keterwakilan perempuan di DPRD
Th 2016 s.d 2021 Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kursi DPRD yang diduduki Perempuan	14	14	14	15	15	15
2	Jumlah kursi Total keanggotaan di DPRD	45	45	45	45	45	45
3	Prosentase Perempuan yang menjadi anggota DPRD Partai Politik	31,11 %	31,11 %	31,11 %	33,33 %	33,33 %	33,33 %

Sumber: DPRD Kabupaten Temanggung

Jumlah Partisipasi perempuan yang menjadi anggota DPRD Tahun 2019 -2024 sebanyak 15 orang dari total kursi anggota DPRD sebanyak 45 orang. Hal ini telah diatur dalam regulasi Undang-undang Pemilu mengenai 30% unsur keterwakilan perempuan pada keanggotaan DPRD.

Keterwakilan Perempuan di Lembaga Politik di Kabupaten Temanggung sbb:

NO	NAMA	PARTAI
1	IKA RIZKIWATI,SE	PDIP
2	DWI LINDA WATI, SH, MH	GOLKAR
3	UMI FADHILAH	NASDEM
4	SITI MARGO LESTARI	HANURA
5	HERNANDIA HAPPY SAFITRI	PDIP
6	PERMATRIYDANI W, S.HI	PKS
7	TRI EKO WASTI	PKB
8	E. INTAN KURNIASARI,SE, M.Acc	PDIP
9	INDAH CAHYANI,S.Sos	GERINDRA
10	YENI KUSNITA	GERINDRA
11	ELYNAWATI .S.Pd	PKS
12	Dra.TITIK WINARTI	PDIP
13	Hj. SITI KUSTIJAH, S.Ag	NASDEM
14	Hj.UMI TSUWAIBAH ,S.Ag.M.Si	PKB
15	DWI SULISTYOWATI	PDIP

8. CAKUPAN TERBENTUKNYA FKUB DI KECAMATAN

FKUB adalah Forum yang mencakup tentang kerukunan Umat beragama di Kabupaten Temanggung. Untuk menghitung prosentase cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah FKUB di kecamatan dibagi jumlah Kecamatan yang ada, di kali 100%

Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10
Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan
Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah FKUB di kecamatan	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah kecamatan di kab. Temanggung	20	20	20	20	20	20
3	Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan (%)	0	0	0	0	0	0

Sumber:Kesbangpol Kab. Temanggung, 2021

Pembentukan FKUB di tingkat Kecamatan sampai dengan tahun 2021 belum dapat terbentuk, hal ini dikarenakan

belum adanya petunjuk atau belum adanya regulasi yang menjadi rujukan untuk membentuk FKUB di tingkat Kecamatan. Sehingga prosentase terbentuknya FKUB di tingkat Kecamatan 0%. Dan untuk data dukung Nihil.

9. PERSENTASE TERDETEKSI DAN TERTANGANINYA KONFLIK SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN, DAN EKONOMI

Untuk memperoleh prosentase terdeteksi dan tertanganinya konflik di bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi digunakan rumus berikut: Jumlah konflik yang tertangani di bagi jumlah konflik yang melaporkan, di kali 100 %

Tabel 2.11

Prosentase Terdeteksi dan Tertangani Konflik Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Tahun 2016 s.d TW IV 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah konflik yang tertangani	26	31	40	5	2	1
2	Jumlah keseluruhan konflik yang dilaporkan	26	31	40	5	2	1
3	Prosentase konflik yang tertangani	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kesbangpol Kab. Temanggung, 2021

Pada triwulan IV Tahun 2021 ada konflik agama yang muncul di Kelurahan Tlogorejo dan telah tertangani. Prosentase tertangani konflik di bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan & ekonomi Tahun 2021 sebesar 100% .

10. PERSENTASE TERDETEKSI DAN TERTANGANINYA KONFLIK POLITIK DAN KEAMANAN DAERAH

Untuk mencari prosentase konflik politik dan keamanan daerah yang telah tertangani digunakan rumus sebagai berikut: Jumlah konflik yang tertangani di bagi jumlah konflik yang dilaporkan, dikali 100 %

Tabel 2.12

Persentase Terdeteksi dan Tertanganinya Konflik Politik dan Keamanan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 s.d Triwulan IV 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah konflik politik dan keamanan daerah yang tertangani	14	10	5	2	1	0
2	Jumlah konflik politik dan keamanan daerah yang dilaporkan	14	10	5	2	1	0
3	Persentase jumlah konflik politik dan keamanan daerah yang tertangani (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber : Kesbangpol Kab. Temanggung, 2020

Tidak ada konflik yang muncul pada tahun 2021. Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah pada tahun 2021 s/d triwulan IV adalah 100%.

11.PERSESENTASE DESA/KELURAHAN YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Untuk mendapatkan angka/persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat menggunakan rumus berikut: Jumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di bagi Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Temanggung dikali 100%.

Tabel 2.13 ProsentaseDesa/Kelurahan yang telah mendapatkan Pembinaan Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2016 s.d Triwulan IV 2021

N o	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	6	9	10	1	183	106
2	Jumlah keseluruhan Desa / Kelurahan yang ada	289	289	289	289	289	289
3	Prosentase Desa/Kel yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	0,69	1,03	0,34	0,35	63,32	36,68

Sumber :KembangpolKab. Temanggung, 2021

Jika melihat Data Pokok TW IV Tahun 2019 ada 11 desa yang terlaporkan mendapat sosialisasi P4GN, angka ini adalah jumlah akumulasi desa yang mendapat sosialisasi dari tahun 2014. Akan tetapi pada RPJMD periode 2019 s.d 2023 dengan tahun awal 2019, kami melaporkan 1 desa yang mendapat sosialisai P4GN karena digunakan penghitungan target tahunan bukan akumulasi. Di tahun 2020 sebanyak 183 desa di Kabupaten Temanggung mendapat sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Di tahun 2021 sampai dengan triwulan IV ada 106 desa yang mendapatkan sosialisasi pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Jumlah keseluruhan desa yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak tahun 2019 s.d 2021 adalah 289 desa dari total 289 desa/kelurahan.

NO	DESA YANG MENDAPAT SOSIALISASI TAHUN 2021				
	Kec. Ngadirejo	37	Losari	73	Prangkolan
1	Ngadirejo	38	Balerejo	74	Lowungu
2	Gondangwinangun	39	Kerokan	75	Larangan Luwok
3	Gandu Wetan	40	Legoksari	76	Congkrang
4	Ngaren	41	Tlilir	77	Kebondalem
5	Mangunsari	42	Gedegan	78	Kemuning
6	Dlimoyo	43	Pagersari	79	Selosabrang
7	Purbosari		Kec. Bansari	80	Petung
8	Campursari	44	Bansari	81	Prangkolan
9	Tegalrejo	45	Mojosari	82	Selosabrang
10	Giripurno	46	Rejosari	83	Tanjungsari
11	Katekan	47	Gunungsari	84	Petung
12	Banjarsari	48	Balesari	85	Duren
13	Medari	49	Purborejo	86	Ngaliyan
14	Karanggedong	50	Tlogowero		Kec. Gemawang
15	Munggangsari	51	Mranggen Kidul	87	Gemawang
16	Kataan	52	Tanurejo	88	Muncar
17	Petirejo	53	Campuranom	89	Kemiriombo
18	Pringapus	54	Candisari	90	Ngadisepi
19	Gejagan	55	Gentingsari	91	Krempong
20	Manggong	56	Mranggen Tengah	92	Sucen
	Kec. Tretep		Kec. Wonobojo	93	Karangseneng
21	Tretep	57	Cemoro	94	Banaran
22	Donorejo	58	Kebonsari	95	Kalibanger
23	Nglarangan	59	Pesantren	96	Jambon
24	Sigedong	60	Pateken		Kec. Kledung
25	Bonjor	61	Pitrosari	97	Kledung
26	Tempelsari	62	Purwosari	98	Kalirejo
27	Campurejo	63	Rejosari	99	Paponan

28	Bojong	64	Semen	100	Jeketro
29	Bendungan	65	Tawang Sari	101	Kwadungan Gunung
30	Simpar	66	Tening	102	Kwadungan Jurang
31	Tlogo	67	Wates	103	Tlahap
	Kec. Tlogomulyo	68	Wonoboyo	104	Petarangn
32	Tlogomulyo	69	Wonocoyo	105	Canggal
33	Candisari		Kec. Bejen	106	Jambu
34	Sriwungu	70	Bejen	107	Kruwisan
35	Langgeng	71	Banjarsari	108	Batursari
36	Tanjungsari	72	Jlegong	109	Tuksari

12. CAKUPAN SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Untuk menghitung jumlah sekolah yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba, digunakan rumus sebagai berikut: Jumlah SMP negeri/swasta yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dibagi jumlah seluruh SMP negeri/swasta yang ada di Kabupaten Temanggung dikali 100.

Tabel 2.14

Prosentase jumlah sekolah yang telah Mendapatkan Pembinaan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2020 sd TW III 2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah sekolah yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	61	81	101	0	0	0
2	Jumlah sekolah yang ada	113	113	113	80	80	80
3	Prosentase sekolah yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	17	17	17	0	0	0

Sumber :Kembangpol Kab. Temanggung, 2021

Dari Data Pokok TW IV Tahun 2019 ada 101 sekolah yang mendapat sosialisasi P4GN, angka ini adalah jumlah akumulasi sekolah yang mendapat sosialisasi dari tahun 2014. Akan tetapi pada RPJMD periode 2019 s.d 2023 dengan tahun awal 2019, kami melaporkan 0 sekolah yang

mendapat sosialisai P4GN karena pada tahun 2019 tidak ada sekolah yang mendapatkan sosialisai P4GN dan digunakan penghitungan target tahunan bukan akumulasi. Sejak tahun 2019 sampai dengan triwulan III tahun 2021 belum ada pelaksanaan sosialisai pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah karena fokus pelaksanaan baru di desa/kelurahan.

2) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari 12 indikator terdapat 6 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - a) Presentase sekolah yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan
 - b) Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan
 - c) Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan
 - d) Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba
 - e) Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya
 - f) Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung antara lain :
 - a. Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan banyak terpotong karena adanya refocusing anggaran

- b. Pandemi covid 19 mengakibatkan kegiatan di Bankesbangpol yang rata-rata adalah kegiatan sosialisasi tidak dapat dilaksanakan

3) Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan anggaran kegiatan di luar rancangan awal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - d. Pengadaan perlengkapan Gedung kantor
 - e. Pengadaan peralatan Gedung kantor
 - f. Pengadaan seragam tenaga keamanan
2. Memunculkan kembali anggaran yang di nol kan karena refocusing
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah
 - c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table berikut:

Tabel 2.15

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.791.973.599		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.288.002.359
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.538.087.599		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.538.087.599		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.791.896.359
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Temanggung	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	2.500.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	2.500.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Temanggung	Tersedianya bahan logistik kantor	12	Bulan	7.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12	Bulan	7.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	6.750.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	6.750.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Temanggung	Terfasilitasinya kunjungan tamu	12	Bulan	7.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya kunjungan tamu	12	Bulan	7.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Temanggung	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Bulan	30.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Bulan	130.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Temanggung	Tersedianya jasa surat menyurat	12	Bulan	-		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12	Bulan	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Temanggung	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	20.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	20.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Temanggung	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	5.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	5.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Temanggung	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	12	Bulan	133.636.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	12	Bulan	143.636.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Temanggung	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	32.000.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	32.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Temanggung	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	12	Bulan	5.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	12	Bulan	5.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Temanggung	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12	Bulan	5.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12	Bulan	5.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor								Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor		1	Paket	40.300.000
	Pengadaan peralatan Gedung kantor								Pengadaan peralatan Gedung kantor		1	Paket	85.500.000
	Pengadaan Pakaian dinas tenaga keamanan								Pengadaan Pakaian dinas tenaga keamanan		1	Paket	6.420.000
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					0			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				-
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>					0			<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>				-
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Temanggung	Terlaksananya penyusunan program kerja di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			0			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya penyusunan program kerja di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3	kegiatan	48.381.100
													-
	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik					1.286.687.850			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik				1.536.687.850
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>					1.286.687.850			<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>				1.536.687.850
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah	Temanggung	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah			1.286.687.850			Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah			1.536.687.850

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						0			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				-	100.000.000
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>						0			<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>				-	100.000.000
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Temanggung	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			100.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						631.000.000			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				-	836.597.640
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>						631.000.000			<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>				-	836.597.640
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Temanggung					631.000.000			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				836.597.640	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						1.025.000.000			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				-	1.035.000.000
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>									<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>				-	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						1.025.000.000			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1.025.000.000	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,						0			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,				10.000.000	

Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

4) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lain dan bukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun dalam proses ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.16 Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Desa Ngemplak	Terlaksananya Sosialisasi penanganan konflik masyarakat	1 Paket	Pagu Rp. 25.000.000

5) Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

Tabel 2.17
Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Pembaharuan data ormas door to door.	Kesbangpol, ormas	APBD	Jemput bola pembaruan data ormas	Data ormas	Tersedianya informasi keberadaan dan kepengurusan ormas yang up to date.	Kesbangpol - 2021
2	Desk pembuatan LPJ Banpol dari partai ke partai	Kesbangpol, parpol	APBD	Bankesbangpol sebagai fasilitator bantuan keuangan parpol memiliki inisiatif untuk melakukan desk dari partai ke partai.	LPJ yang sesuai	Tersusunnya LPJ banpol yang sesuai dengan aturan	Kesbangpol - 2021

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh (Perangkat Daerah) lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh (Perangkat Daerah) Kabupaten Temanggung.

2) Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2023 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2023

VISI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023 TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM							
MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2023	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berkarakter, dan Berdaya	Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan		Indeks Gotong Royong	%	4,22	4,22
				Indeks Toleransi	%	4,19	4,19
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	62	62
				Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	10	10
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	%	87	87
				Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	%	30	30
				Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	%	30	30
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	%	100	100
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan	Persentase terdeteksi dan tertanganinya	%	100	100

			Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi			
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	%	100	100
				Persentase desa/ kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	10	10
				Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	35	35

Sumber : Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Perubahan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2023

RANCANGAN RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TAHUN 2023			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.134.815.189		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.134.815.189	0
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah KABUPATEN/KOTA	3.278.148.599	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah KABUPATEN/KOTA	3.278.148.599	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.538.087.599		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.538.087.599	0
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.538.087.599		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.538.087.599	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	336.175.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	336.175.000	0
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	327.000.000		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	327.000.000	0
	Pengadaan seragam ASN	9.175.000		Pengadaan seragam ASN	9.175.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.250.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.250.000	0
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.000.000	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.750.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.750.000	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.636.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.636.000	0
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000	-

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.636.000			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.636.000	0
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	187.000.000			<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	187.000.000	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32,000,000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32,000,000	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	-
	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	0					0
	Pengadaan peralatan Gedung kantor	0					0
	Pengadaan Pakaian dinas tenaga keamanan	0					0
2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	48.381.100		2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	48.381.100	-
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	48.381.100			<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	48.381.100	-
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	48.381.100			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	48.381.100	-
3	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.736.687.850		3	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan	1.736.687.850	0

					PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.736.687.850			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.736.687.850	0
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah	1.736.687.850			Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah	1.736.687.850	0
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100.000.000		4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100.000.000	0
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100.000.000			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100.000.000	-
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.000.000			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.000.000	-
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	836.597.640		5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	836.597.640	-
-	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	836.597.640			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	836.597.640	-
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	836.597.640			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	836.597.640	-

	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.135.000.000		6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.135.000.000	-
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	1.135.000.000			<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	1.135.000.000	-
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.125.000.000			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.125.000.000	-
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10.000.000			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10.000.000	-

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah disesuaikan berdasarkan program, sub kegiatan dan pagu indikatif RKPD.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2023

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2023				Total	Alokasi Anggaran 2022	Kinerja Anggaran Tahun 2021			Prakiraan Maju Rencana 2024
Urn	Bid. Urn	Prog.	Keg.	S. Sub. Keg.			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif			Alokasi	Realisasi	%	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					7.134.815.189	7.694.978.654	4.849.251.994	4.774.836.504	98,47	7.288.623.949	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.278.148.599	2.745.164.846	2.437.039.953	2.364.967.724	97,04	3.531.957.359	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.538.087.599	2.171.914.846	2.226.391.653	2.168.857.897	97,42	2.791.896.359	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	22	orang	2.538.087.599	2.171.914.846	2.226.391.653	2.168.857.897	97,42	2.791.896.359	
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kab. Temanggung			336.175.000	327.000.000	-	-	0,00	336.175.000	
8	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Temanggung	250	orang	327.000.000	327.000.000	-	-	0,00	327.000.000	
					Pengadaan Bahan Seragam ASN		Kab. Temanggung	25	orang	9.175.000	0				9.175.000	

8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Temanggung			58.250.000		32.064.000	23.578.900	23.498.319	99,66	58.250.000
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	10	paket	2.500.000		1.250.000	2.753.800	2.702.500	98,14	2.500.000
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	paket	7.000.000		5.000.000	4.599.100	4.590.000	99,80	7.000.000
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	paket	6.750.000		4.314.000	3.451.000	3.446.000	99,86	6.750.000
8	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	12	laporan	12.000.000		6.500.000	6.100.000	6.085.319	99,76	12.000.000
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	12	laporan	30.000.000		15.000.000	6.675.000	6.674.500	99,99	30.000.000
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Temanggung			158.636.000		152.936.000	154.831.000	141.805.043	91,59	158.636.000
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Temanggung			-		-	2.520.000	2.400.000	95,24	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	laporan	20.000.000		16.800.000	16.200.000	11.013.325	67,98	20.000.000
8	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	laporan	5.000.000		2.500.000	2.475.000	2.400.000	96,97	5.000.000
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Temanggung	12	laporan	133.636.000		133.636.000	133.636.000	125.991.718	94,28	133.636.000

8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Temanggung			187.000.000		61.250.000	32.238.400	30.806.465	95,56	187.000.000
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Temanggung	12	unit	32.000.000		55.000.000	29.344.700	27.924.265	95,16	32.000.000
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Temanggung	12	unit	150.000.000		3.250.000	1.370.700	1.369.000	99,88	150.000.000
8	01	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Temanggung	12	unit	5.000.000		3.000.000	1.523.000	1.513.200	99,36	5.000.000
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Kab. Temanggung			48.381.100		48.381.100	45.466.903	44.861.300	98,67	48.381.100
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologiancasila dan Karakter Kebangsaan		Kab. Temanggung			48.381.100		48.381.100	45.466.903	44.861.300	98,67	48.381.100
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kab. Temanggung	12	bulan	48.381.100		48.381.100	45.466.903	44.861.300	98,67	48.381.100
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan					20.000.000						
					Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan					28.381.100						

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2023 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2023 nanti.

Pada tahun 2021 total anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 4.849.251.994 dengan realisasi sebesar Rp. 4.774.836.504,00 atau terealisasi sebesar 98,46 %. Terjadi **efisiensi anggaran pada tahun 2021 sebesar 1,54%**.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapat alokasi anggaran Rp. 5.734.661.449,00 yang terdiri dari 6 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik; Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan

Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG

DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19721126 199203 1 002